

Mencoba Peruntungan Penurunan UKT

Tidak adanya kejelasan mengenai prosedur penurunan Uang Kuliah Tunggal (UKT) menyebabkan beberapa mahasiswa menjadi korban kebijakan sistem UKT.

Dari arah selatan lobi Sekretariat ISO Fakultas Ilmu Sosial (FIS), tampak seorang perempuan menghampiri bangku tempat Tim EXPEDISI menunggu. Ia memperkenalkan diri seraya mengulurkan tangan. "Afridha," ucapnya. Setelah berbasa-basi sejenak, akhirnya kami memutuskan untuk melakukan wawancara di laboratorium sejarah.

Afridha Sumunariningtyas saat ini menempuh semester lima di program studi Ilmu Sejarah. Ia bercerita bahwa dirinya sudah dua kali mencoba menurunkan UKT. Pertama kali ia mengajukan penurunan UKT pada 2015, semester pertama, sebab salah satu orang tuanya sakit.

"Mata bapak sakit, kayak *blur gitu*. Jadi tidak memungkinkan untuk bekerja

jadi supir," tuturnya, Selasa (17/10). "Jadi bapak cuma buka warung di depan rumah, jual gorengan, semacam ankringan *gitu*," lanjutnya.

Afridha bersama ibunya mengajukan penurunan UKT ke rektorat. Di sana ia bertemu dengan Setyo Budi Takarina, Kepala Biro Umum Perencanaan dan Keuangan (BUPK). Budi menjelaskan mengapa Afridha mendapatkan UKT golongan III sebesar 3 juta 145 ribu rupiah. Penyebabnya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) milik keluarga Afridha mendapat poin tertinggi, yakni 100. Poin tersebut diambil dari hasil pengisian data ekonomi saat pertama masuk kuliah di UNY.

Ia mendapatkan PBB tinggi karena tanah miliknya berada di pinggir jalan. Pengajuan penurunan UKT yang pertama

itu yang turun cuma 10 atau 11 orang," paparnya. Ia tidak mengetahui alasan mengapa pengajuannya ditolak.

Setelah penurunan UKT ditolak kedua kalinya, ada niatan untuk melakukan kerja sambilan. Namun hal itu diurungkan oleh Afridha. "Sama ibu enggak boleh cari uang," kata Afridha. "Pokoknya kuliah yang bener, uang itu urusan ibu," lanjut Afridha mengingat ucapan ibunya yang kesehariannya bekerja sebagai guru honorer salah satu sekolah swasta di Kulon Progo.

Salah seorang teman Afridha yang ikut mencoba menurunkan UKT ialah Hernantya Adila Pramita Devi. Kamis petang, 26 Oktober 2017, di sebuah warung kopi dekat Jembatan Merah Gejayan, mahasiswi Ilmu Sejarah yang biasa dipanggil Devi ini menuturkan bahwa dirinya pertama kali menurunkan UKT lewat Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FIS pada semester dua.

Berbagai persyaratan penurunan UKT telah ia lengkapi, termasuk wawancara. Setelah itu, ia sama sekali tidak mendengar kabar dari DPM. "DPM bilanganya bakal dinaikin ke rektorat, tetapi ditunggu berbulan-bulan kok tidak ada kabar," keluh Devi. Alasan Devi menurunkan UKT adalah pendapatan usaha kedua orang tuanya menurun.

Pada

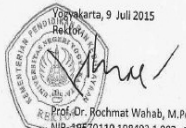
2016, memasuki semester tiga, Afridha mengajukan penurunan UKT untuk kedua kalinya.

Saat semester tiga, ia kembali mencoba menurunkan UKT-nya bersama Afridha. Namun lagi-lagi tidak ada kabar. Cuti sempat terpikirkan olehnya, tetapi hal itu diurungkan. Ia mendapatkan permohonan bantuan dari teman-teman di jurusannya untuk melanjutkan kuliah. Niat untuk cuti sempat muncul lagi ketika memasuki semester lima, sebab pendapatan usaha orang tuanya kian menurun. "Tapi ada pinjaman, terus *enggak* jadi cuti," ujarnya.

Demi mengembalikan uang pinjaman yang digunakan membayar UKT, Devi pun sempat kerja. Ia mengambil kerja sambilan di salah satu restoran makanan cepat saji selama liburan semester. Merasa tidak bisa membagi waktu untuk kuliah dan kerja, ia memutuskan untuk

TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2015/2016

No.	Kategori	Tarif Uang Kuliah Tunggal/Semester/Mahasiswa (dalam Rupiah)		
		Kelompok A (Prodi Pendidikan, Bahasa/Sastra, Sosial, dan Ekonomi)	Kelompok B (Prodi MIPA, Olahraga, Seni, Geografi, dan PGSD)	Kelompok C (Prodi Teknik)
1.	I	500.000	500.000	500.000
2.	II	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.	III	2.400.000	2.400.000	2.400.000
4.	IV	3.145.000	3.630.000	4.235.000
5.	V	3.630.000	4.235.000	4.840.000
6.	VI	4.235.000	4.840.000	5.445.000
7.	VII	4.940.000	5.645.000	6.350.000

Yogyakarta, 9 Juli 2015
Rektorat

Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.
NIP. 19570110 198403 1 002

Dok. Istimewa

■ Tarif UKT mahasiswa baru UNY tahun 2015/2016

berhenti kerja usai liburan semester. “Jam kerjanya tidak menentu,” kata Devi

Beda cerita dengan Aninditya Ayunisa Utami, mahasiswa Kebijakan Pendidikan 2016 ini mencoba menurunkan UKT lewat bantuan BEM Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) pada Mei 2017. Salah mengisi penghasilan orang tua menjadi alasan Dita menurunkan UKT. Ia menuliskan jumlah total penghasilan orang tua di kolom penghasilan sampingan sebesar 1 juta 500 ribu rupiah.

Ketika hendak membayar, Dita kaget dengan biaya UKT yang harus dibayarkan. Ia harus membayar 4 juta rupiah pada saat itu. Waktu itu ralat UKT sudah ditutup, sehingga ia membayar UKT dengan nominal tersebut. “Daripada aku *enggak* jadi kuliah di sini kan ya awal-awalnya, terus ya sudah, dibayar dulu *segitu*,” jelasnya Kamis (19/10) saat diwawancarai di kampus FIP.

Kedua orang tua Dita bekerja sebagai pedagang. Rata-rata penghasilan mereka 700 ribu rupiah per bulan dengan total kira-kira 1 juta 500 ribu rupiah. Meski Dita mendapatkan beasiswa PPA, hal itu masih dirasa kurang untuk membayar UKT.

“4 juta itu dilihat dari penghasilan orang tuaku yang *segitu* itu, aduh,” keluhnya. Untuk menambah uang saku, Dita berjualan makanan ringan yang dititipkan di kantin. Ia mendapatkan tambahan uang saku sekitar 20–30 ribu rupiah per minggu dari hasil jualan.

Hingga kini belum ada pengumuman perihal penurunan UKT oleh BEM. Dita menyalahkan pihak BEM tidak melakukan sosialisasi kepada mahasiswa yang menurunkan UKT lewat jalur mereka. “Setidaknya bilang, biar kita itu *enggak* merasa digantung begini,” keluh Dita.

Priantoni Wibowo, Kepala Departemen Kesejahteraan Mahasiswa BEM KM, mengatakan pengajuan penurunan UKT massal memakan waktu lebih lama. Tahun ini, BEM bekerjasama dengan Tim Advokasi masing-masing fakultas untuk membuka pengajuan penurunan UKT. Seleksi dilakukan dari 980 berkas dari tujuh fakultas menjadi 293 berkas sebelum dinaikkan ke rektorat.

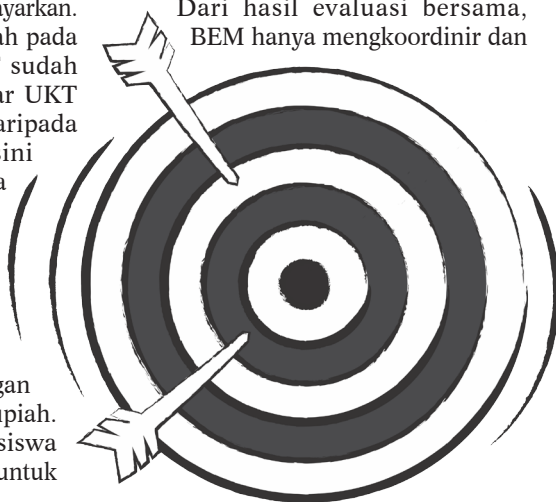
Sejak Juni 2017 hingga saat ini BEM belum mendapatkan kabar dari rektorat. Toni mengaku sudah mengecek bagian keuangan pada Rabu (11/10). Dari sana

ia mendapatkan penjelasan bahwa berkas sedang diperiksa oleh bagian keuangan. “keputusan terakhir UKT dari WR II,” kata Toni.

Toni mengatakan telah mengabarkan tim advokasi fakultas bahwa penurunan UKT masih belum mendapatkan hasil. Untuk sosialisasi perihal tersebut, ia menjelaskan bahwa itu merupakan kebijakan dari masing-masing fakultas.

Akibat terlalu lamanya proses seleksi dari rektorat, BEM mencukupkan pengajuan penurunan UKT secara massal.

Dari hasil evaluasi bersama, BEM hanya mengkoordinir dan



Repro | Araw

memfasilitasi dengan cara mengantar mahasiswa yang ingin mengajukan penurunan UKT ke rektorat.

“Jadi ada mahasiswa ingin mengajukan penurunan UKT kita antar. Biar lebih efisien dan efektif,” jelas Toni Jumat (13/10). Tujuannya agar mahasiswa tahu prosedur dan pelayanan rektorat untuk mahasiswa yang ingin menurunkan UKT.

Menanggapi permasalahan tersebut, Tim EXPEDISI mencoba melakukan verifikasi kepada Budi selaku Kepala BUPK UNY. Budi hanya berkenan diwawancarai melalui surel. Ia mengirimkan surel balasan pada Senin (30/10). Menanggapi permasalahan tersebut, ia menulis berdasarkan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 39 tahun 2017.

Dalam Pemenristekdikti No. 39 Tahun 2017, pasal 5 ayat 1, pemimpin PTN dapat memberikan keringanan UKT kepada pihak yang mengajukan penurunan. Bagi mahasiswa yang akan mengajukan penurunan UKT akan diproses dengan dua alasan; pertama kemampuan ekonomi tidak sesuai

(salah mengisi); kedua perubahan data ekonomi.

Perubahan data ekonomi yang dimaksud adalah penurunan penghasilan secara drastis. Seperti orang tua atau pihak yang membiayai pensiun, meninggal dunia, dan bangkrut. Termasuk juga untuk pemutusan hubungan kerja dan di dalam keluarga tersebut memerlukan biaya perawatan kesehatan rutin.

Alasan tersebut harus disertai bukti yang relevan. Jika alasan yang dikemukakan pensiun, bukti yang dilampirkan yakni surat keterangan pensiun yang tertulis Gaji Pokok Pensiun. Begitu juga untuk yang lainnya. Penurunan pun berdasarkan skor yang didapat dari tiap indikator.

“Jika dari data yang diajukan belum dapat digunakan mengambil keputusan apakah UKT tetap atau dapat diturunkan maka dilakukan survei ke keluarga pemohon dan atau masyarakat sekitar pemohon.” Begitu salah satu isi dari jawaban dari Budi.

Masih belum diketahui bentuk survei yang dimaksud. BEM mengakui bahwa mereka tidak melakukan survei lapangan karena keterbatasan sumber daya manusia. “Pasca silaturahmi dengan WR II itu pun, survei juga ke lapangan,” jelasnya. Setelah dikonfirmasi lewat Whatsapp, survei yang diketahui Toni seperti mendatangi rumah hingga menanyakan kepemilikan fasilitas, sertifikat tanah, dan yang lainnya. Untuk waktu pelaksanaan, ia mengatakan hanya pihak rektorat yang mengetahui. Sedangkan dari birokrat sendiri tidak menanggapi saat dikonfirmasi mengenai bentuk survei yang dilaksanakan.

Selama ini Devi tidak mendapatkan survei dalam bentuk apapun dari rektorat. Demikian pula dengan Afridha. “Tidak ada tanggapan apapun dari rektorat,” tegas Devi.

Menanggapi kasus tidak diturunkannya UKT Devi dan Afridha, Budi mengatakan untuk disampaikan saja kepada dirinya. “Kalau ada yang usul dengan kondisi seperti itu, didukung dokumen yang cukup, tetapi belum turun UKT-nya, mohon sampaikan saja namanya (nama pengaju) (dan) suratnya tanggal berapa ke saya. Biar saya cek ke staf saya. Terima kasih,” kata Budi lewat pesan singkat pada Selasa, (31/10).

Khansa Nabilah
Alfian, Bagas, Yasin